

EKSISTENSI KELEMBAGAAN ULAMA PEREMPUAN DI NUSA TENGGARA BARAT

Jumarim
Universitas Islam Negeri Mataram
jumarim@uinmataram.ac.id

Abstract

This study aims to map the forms, strategies and impacts of social roles that have been carried out by PW Muslimat NU NTB and PW Aisyiyah NTB. The data collection methods in this study were intensive observation, in-depth interviews and documentation. The process of data analysis in this study will be carried out in an on-going process in the field, so that it is easy to dig up missing data or confirm data that is still unclear. The results of the study show that the social roles that have been carried out by PW Muslimat NU NTB and PW Aisyiyah NTB in gender inequality and injustice in NTB at this time can at least be reduced due to the hard work of Aisyiah and Muslimat NU with other groups, for example with almost equal education participation rates. between men and women at the SD/MI, SMP/MTS and SMA/SMK levels, even to the tertiary level. The consistency and continuity of the Aisyiah and Muslimat NU movements in boosting the dignity of women in NTB is something more than these two organizations compared to women's organizations that fall into the category of NGOs and NGOs which tend to be programmatic, casuistic and highly dependent on donors. Even the institutional pattern of NGO women's groups continues to change according to the "internal needs" of the NGO group and the NGO itself or "external demands" from donor groups.

Keywords: Social Role, Muslimat NU NTB, Aisyiyah NTB

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk memetakan bentuk, strategi dan dampak peran sosial yang sudah dijalankan oleh PW Muslimat NU NTB dan PW Aisyiyah NTB. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi intensif (intensive observation), wawancara mendalam (indept interview) sekaligus dokumentasi (documentation). Proses analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara sambil berproses (on going proceses) di lapangan, agar mudah menggali data yang kurang atau mengkonfirmasi data yang masih samar. Hasil penelitian menunjukkan peran sosial yang sudah dijalankan oleh PW Muslimat NU NTB dan PW Aisyiyah NTB dalam ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di NTB saat ini , minimal sudah dapat berkurang akibat kerja keras Aisyiah dan Muslimat NU dengan kelompok lainnya, misalnya dengan hampir setaranya antara Angka Partisipasi Pendidikan atara laki dan perempuan di level SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK, bahkan ke tingkat perguruan tinggi. Konsistensi dan kesinambungan gerakan Aisyiah dan Muslimat NU dalam mendongkrak harkat dan martabat

perempuan di NTB adalah hal yang lebih dari ke dua organisasi ini dibandingkan dengan organisasi perempuan yang masuk kategori LSM dan NGO yang cenderung programatik, kasuistis dan sangat bergantung pada donor. Bahkan pola kelembagaan kelompok perempuan LSM/NGO pun terus berubah sesuai “kebutuhan internal” kelompok LSM dan NGO itu sendiri atau “tuntutan eksternal” dari kelompok donor.

Kata Kunci : Peran Sosial, Muslimat NU NTB, Aisyiyah NTB

PENDAHULUAN

Dinamika teoritik dan gerakan feminisme terhadap perubahan sosial mulai terasa hasilnya secara signifikan pada bidang kehidupan yang proses atau basis pengelompokan sosial di dalamnya bertumpu pada pilihan rasional-struktural seperti bidang sosial, politik dan ekonomi, sementara pada wilayah pilihan irrasional-kultural seperti bidang agama dan budaya justru cenderung stagnan. Bahkan cenderung pemahaman keagamaan dinilai sebagai penghalang terberat bagi terwujudnya relasi sosial yang bebas dari segala bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender (*gender inequalities*). Beragam strategi dan agenda telah dilakukan oleh berbagai pihak baik melalui regulasi dalam bidang pendidikan bahkan melalui kebijakan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) oleh Kementerian Agama dan kementerian lainnya, namun hasilnya belum tampak menggembirakan.

Beragam studi dan evaluasi terhadap program *mainstreaming gender* dalam bidang keagamaan terus dilakukan, namun kesimpulan umum masih menempatkan pendidikan sebagai dasar dan sumber utama pembentukan wacana keagamaan khususnya pendidikan agama baik melalui jalur formal, informal maupun non formal sebagai sarang kendala sekaligus sumber kendalinya. Pendidikan agama masih dikuasai oleh elite agama atau ulama yakni yang ditokohkan secara sosial atas dasar kepemilikannya terhadap ilmu agama. Secara sosiologis ulama dapat dijumpai di setiap kelompok masyarakat berdasarkan suku, etnis, wilayah bahkan ideologi keagamaannya dengan beragam istilah seperti Kiyai (Jawa), Anjengan (Sunda), Dato' (Sumatra Barat, Tengku (Aceh) dan Tuan Guru (Lombok). Secara biologis-sex, maka yang menyandang gelar ulama dengan beragam istilah sosiologisnya ini adalah laki-laki tanpa satupun perempuan. Artinya, stagnannya dinamika teoritik dan gerakan

feminis dalam bidang agama disebabkan oleh kuatnya wacana keagamaan yang bias gender yang senantiasa diproduksi oleh ulama yang nota bene semuanya laki-laki.

Secara umum, Nasaruddin berkesimpulan bahwa al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tapi menolak adanya pembedaan (*discrimination*) antara keduanya.¹ Penggunaan kata *al-dzakar* dan *al-untsa* secara konsisten sebagai kata yang menunjukkan laki dan perempuan secara biologis atau sex dalam al-Qur'an adalah bukti adanya perbedaan, namun dengan banyaknya dan beragamnya kata yang dipergunakan untuk menunjukkan makna laki dan perempuan dalam makna gender seperti *al-rajul* dan *al-zanj* untuk laki dan *al-mar'ah*, *al-nisa'* dan *al-zanjah* untuk perempuan.² Konsep dasar tentang keadilan dan kesetaraan gender ini mengalami proses perubahan atau pergeseran ke arah tidak adil dan bias gender dalam sejarah Islam yang telah dibuktikan oleh Ruth Rodet melalui pemetaannya terhadap peran ulama Muslimah dalam pengembangan keilmuan pada setiap generasi. Menurut Rodet, pada masa Sahabat, jumlah dan kontribusi keilmuan dari perempuan muslimah cukup memadai dan berkualitas baik sebagai penghafal, pengajar dan kolektor naskah al-Qur'an maupun sebagai perawi al-hadist. Namun, pasca generasi kedua, kuantitas dan kualitasnya mengalami pengurangan secara drastis hingga abad XVII M.³ Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan doktrin keagamaan yang mengatur tentang peran dan pola relasi antara laki-laki dan perempuan dari *gender equality* menjadi *gender inequality* dalam bentuk pembatasan bagi perempuan terhadap akses pendidikan. Akibatnya, Azyumardi Azra menyimpulkan bahwa kajian tentang "ulama perempuan" masih sangat langka, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di wilayah-wilayah lain; Arabia, Asia, Afrika, India, dan sebagainya.⁴

¹Dengan kata lain, al-Qur'an mendukung konsep kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini menurut Nasaruddin Umar, dapat ditemukan dengan lima variable, yaitu (a) laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah (b) laki dan perempuan memiliki fungsi sama sebagai khalifah Allah di muka bumi (c) laki dan perempuan sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordian dengan Allah (d) laki dan perempuan atau Adam dan Hawa sama terlibat secara aktif dalam drama kosmis (e) laki dan perempuan sama berpotensi meraih prestasi. Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999) 247-264.

² Ibid, xxi-xxiii.

³Ruth Rodet, *Kembang Bulan Peradaban* (Jakarta; Logos, 1995), 76.

⁴Azyumardi Azra, *Historiografi Ulama Perempuan dalam Ulama Perempuan Indonesia*, (ed) Jajad Burhanuddin (Jakarta: PPIM, 2002) iii. Ahmad Salabi, *History of Muslim Education*, (Bairut: tp., 1954)

Secara umum, perempuan Sasak mulai mendapatkan akses pendidikan agama Islam pada tahun 1943 ditandai dengan berdirinya Nahdatul Banat Dakwah Islamiyyah (NBDI) di Lombok.⁵ Seorang yang menjadi pimpinan atau pengasuh pondok pesantren, maka secara otomatis sekaligus menjadi tokoh agama pada masyarakat Sasak di Lombok yang disebut *tuan guru*. Belum ada satupun perempuan di Lombok yang mendapatkan pendidikan *tuan guru*, sekalipun tidak sedikit perempuan Sasak memiliki peran yang sama dalam bidang sosial-keagamaan, seperti; menjadi pemimpin lembaga pendidikan, pemimpin organisasi sosial kemasyarakatan, pemimpin partai politik bahkan aktivis lembaga swadaya masyarakat.

Gelar tuan di Lombok identik dengan laki-laki, karena tak satupun perempuan sasak yang mendapatkan gelar sebagai tuan guru. Sebagai bentuk manifestasi ulama secara sosiologis di Lombok, maka tuan guru yang dimaksud adalah spesifik pada figur personal yang memiliki pengaruh luas secara sosial kemasyarakatan. Faktanya tak satupun person di Lombok yang dapat menjadi dan disebut tuan guru sebagai representasi ulama tanpa melembagakan dirinya baik dalam bentuk organisasi sosial keagamaan maupun asosiasi pondok pesantren yang bersifat luas secara wilayahnya.⁶ Apabila tidak dapat melembagakan dirinya, maka dia hanya mendapat panggilan sebagai tuan guru untuk even-even tertentu atau insidental, namun tak mampu memproduksi wacana keagamaan yang akan dipatuhi publik secara luas.

Apabila hasil pemetaan oleh Ruth Rodet diperkuat dengan teori tentang tuan guru yang dikembangkan oleh Jamaluddin tersebut digunakan untuk melakukan pemetaan peran sosial dalam bidang keagamaan, khususnya di Lombok – Nusa Tenggara Barat, maka ulama tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki yang terlembaga melalui *jamiyyah diniyyah ijtimaiyyah* seperti Nahdlatul Ulama, Nahdlatul

46. Jonathan Berkey, *The Transmission of Knowledge in Medieval Cairo: A Social History of Islamic Education* (Princeton: Princeton University Press, 1992) 170.

⁵M. Noor, dkk, *Visi Kebangsaan Relegius; Refleksi Pemikiran dan Perjuangan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Tahun 1904-1997* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004) 58. Setelah berdirinya NBDI dan jumlah pondok pesantren mengalami perkembangan secara signifikan dengan rata-rata membuka pesantren putra dan pesantren putri, maka akses pendidikan untuk laki dan perempuan dapat dikatakan terbuka dan setara, baik sebagai peserta didik atau santri maupun sebagai tenaga pendidik atau *ustadz* dan *ustadzah*.

⁶ Baca; Jamaluddin, *Sejarah Sosial Isla di Lombok Tahun 1740-1933 (studi Kasus terhadap Tuan Guru)*; Jakarta; Balitbang dan Diklat – Kemenag, 2011, hal. 125

Wathan dan Muhammadiyah, melainkan kaum perempuanpun banyak yang dapat dikategorikan sebagai ulama melalui peran sosialnya secara terlembaga melalui jamiyyah diniyyah ijtimaiyyah khusus kaum perempuan seperti Muslimat NU, Muslimat NW dan Aisyiah.

Sekiranya ulama perempuan di Lombok Nusa Tenggara Barat ada melalui kelembagaan ormas PW Muslimat NU, PW Muslimat NW dan PW Aisyiyah NTB bersamaan dengan adanya tuan guru yang melembagakan diri melalui ormas PW NU, PW NW dan PW Muhammadiyah NTB, kemudian dikaitkan kembali dengan dinamika teoritik dan gerakan sosial feminis yang dinilai stagnan dalam mewujudkan tatanan sosial yang berkeadilan dan kesetaraan gender khususnya dalam bidang keagamaan, maka pertanyaan kritisnya adalah apakah ulama perempuan melalui ormas Muslimat NU, Muslimat NW dan Aisyiyah NTB memiliki eksistensi yang kuat, mandiri dan independen dalam menegakkan keadilan dan kesetaraan gender? Atau sebaliknya, ada secara kelembagaan namun eksistensinya masih sebagai subordinasi kelembagaan organisasi payungnya masing-masing seperti PW Muslimat NU NTB dipayungi oleh PW NU NTB, PW Muslimat NW NTB dipayungi oleh PW NW NTB dan PW Aisyiyah NTB dipayungi oleh PW Muhammadiyah NTB sehingga tidak independen dalam menentukan pikiran, sikap dan tindakannya.

METODE PENELITIAN

Data yang digali dalam penelitian ini adalah seputar eksistensi kelembagaan ulama perempuan di Lombok NTB baik menyangkut situasi sosial, politik, ekonomi, agama dan budaya yang menjadi latar historis berdirinya hingga peran sosial yang dimainkan dari semenjak berdiri dan hingga sekarang. Sumber data dalam penelitian ini adalah pengurus dan dokumen resmi dari masing-masing ormas sasaran yang diperkuat dengan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan topic penelitian. Penentuan Muslimat NU dan Aisyiyah sebagai sasaran penelitian ini dilakukan melalui *purposive* peneliti berdasarkan kriteria-kriteria yang disusun oleh peneliti secara deduktif.

Sumber data utama dalam penelitian adalah para pelaku yang bersifat kolektif dalam beragam bentuk. Pernyataan pelaku yang sudah tiada namun dituangkan dalam dokumentasi yang tak dibantah kebenarannya secara internal. Sedangkan data-data pelengkapannya dapat berupa kebijakan tertulis organisasi maupun dokumen lainnya. Oleh karena itu metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi intensif (*intensive observation*), wawancara mendalam (*indept interview*) sekaligus dokumentasi (*documentation*). Proses analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara sambil berproses (*on going procces*) di lapangan, agar mudah menggali data yang kurang atau mengkonfirmasi data yang masih samar.

Setelah secara keseluruhan data dianggap cukup dan tervalidasi melalui empat dari tujuh langkah yang dianjurkan Moleong, yakni; triangulasi sumber dan metode, kecukupan referensi, pengecekan anggota dan pengayaan dengan sejawat,⁷ maka tahapan penelitian akan diakhiri dengan proses pengambilan kesimpulan yang akan dilakukan dengan teknik induktif-deduktif.

HASIL PENELITIAN

1. Potret Muslimat NU NTB

Muslimat NU di NTB lahir dalam rentang waktu yang sangat panjang dengan berdirinya Muslimat NU di Pusat pada tahun 1946, karena sesungguhnya pada tahun 1946, kondisi NU di NTB juga belum begitu kokoh sebagai organisasi,⁸ kecuali setelah keluarnya NU dari Partai Masyumi pada tahun 1953 melalui Muktmarnya di Lampung. NU Provinsi NTB secara organisatoris mandiri baik sbagai jam'iyah ijtima'iah sekaligus jam'iyah siyasiyyah lahir pada tahun 1954 dengan keluarnya SK 3 cabang NU di Lombok, yaitu Lombok Tengah, Lombok Timur dan Lombok Barat. Kehadiran 3 Cabang NU ini menjadi syarat mutlak bagi PBNU untuk membentuk pengurus NU Wlayah NTB pada tahun 1954. Pembentukan dan pelantikan Pengurus NU NTB disertai dengan penunjukkan kader-kader perempuan sebagai pelopor atau

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2001) 75.

⁸ Wawancara dengan H, Ahmad Taqiuddin Mnsur, Ketua PW NU NTN, 14 Nopember 2014

cikal bakal kepengurusan Muslimat NU.⁹ Semenjak status NU menjadi partai politik, baik ketika menjadi partai politik mandiri maupun pada saat fusi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), status Muslimat NU di NTB betul-betul menjadi organisasi onderbow partai politik NU. Karena itu, kepengurusan Muslimat NU di NTB dalam kondisi demikian pun tidak sedinamis setelahnya, dimana ketua Muslimat NU adalah istri atau perempuan yang bisa diatur oleh pimpina partai NU. Muslimat NU NTB betul-betul menjadi pendulang suara bagi partai NU, namun belum banyak menikmati hasilnya, baik saat NU menjadi partai politik sendiri maupun pada saat NU berfusi dengan PPP. Parahnya lagi, Muslimat NU NTB menjadi pendulang suara bagi partai NU, sementara Partai NU betul-betul berposisi hanya menjadi sumber dan pendulang suara bagi PPP, tanpa banyak menikmati hasilnya secara kelembagaan.¹⁰

Ketika kebijakan mono loyalitas yang dikembangkan oleh rezim orde baru, maka kader-kader Muslimat NU di NTB banyak yang mengambil jalan selamat, yakni tidak menjadi pengurus Muslimat NU, terutama yang berada sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab, mereka adalah bagian dari pihak yang harus tunduk atas kebijakan rezim orde baru untuk tetap mendukung dan memilih Golkar, sementara pada satu sisi Muslimat NU yang masih double fungsi; sebagai organisasi social kemasyarakatan bersifat keagamaan (*jam'iyah ijtima'iyah*) dan sebagai onderbow NU sebagai *Jam'iyah Siyasiyyah* yang berfusi dengan PPP. Itu sebabnya, selama NU di NTB masih menjadi Partai Politik, maka selama itu pula pengurus dan aktivis Muslimat NU NTB lebih dominan dari kalangan politisi saja. Namun, karena tahu posisi Muslimat NU dalam Partai hanya sebatas *underbow* NU dan NU hanya bagian yang tak diuntungkan dalam PPP, maka sangat sedikit kader Muslimat NU yang tertarik untuk menjadi pimpinan Muslimat NU NTB, kecuali yang masih ada hubungan keluarga dengan Pengurus partai NU.¹¹

⁹ Pemilu 1955, NU NTB sebagai partai baru, ternyata dapat menjadi partai no urut 3 dari perolehan suara setelah PNI dan Masyumi. Ida Bagus Putu Wijaya Kusumah, NU Lombok (1953-1984) , Mataram, Penerbit Pustaka Lombok, 2010, hlm 67

¹⁰ Wawancara dengan Ahmad Taquiddin Mansur, Ketua PWNU NTB, 25 Nopember 2014 di Mataram

¹¹ Wawancara dengan Hj. Muna'ah Ahsyid, Aktivist Muslimat NU NTB selama Muslimat menjadi Underbow Partai NU dan sekarang menjadi Ketua Khimat Muslimat NU NTB.

Ketika Muktamar NU ke 27 di Situbondo tahun 1984 yang menetapkan Kebijakan strategis bagi perkembangan dan eksistensi NU, yaitu Kembali ke Khittah 1926. Maksud dari kebijakan kembali ke khittah 1926 adalah menempatkan posisi NU sebagai *Jam'iyah Diniyyah Ijtima'iyah* dan berhenti sebagai *Jam'iyah Diniyyah Siyasyyah*. Dengan kebijakan demikian, maka Kembali kader-kader Muslimat NU dari beragam profesi kembali bangkit dan bersemangat untuk menghidupkan kembali eksistensi Muslimat NU NTB dalam menjalankan Kiprahnya. Dengan demikian, maka eksistensi Muslimat NU NTB sebagai kelembagaan Ulama Perempuan dapat dinilai dari masa ini yang disebabkan oleh kesadaran kader Muslimat NU NTB untuk menjadikannya sebagai wadah bersama untuk membangkitkan posisi perempuan Ahlussunah Wal Jama'ah yang menjadi mayoritas sikap keberagamaan masyarakat NTB. Dengan demikian, Periode kelahiran dan keberadaan Muslimat NU di NTB masuk dalam periode orde Baru akhir.

Muslimat NU NTB baru mulai dapat dilihat peran sosialnya secara jernis, sistematis dan rapi pasca Muktamar NU yang menegaskan kembalinya NU ke Khittah 1926 di Situnbodo pada tahun 1984. Muslimat NU NTB melalui segenap perangkatnya bergerak secara sistematis dalam beragam bidang dan aspek terutama menyangkut peningkatan harkat dan martabat perempuan NU, khusus di NTB melalui;

- a. Peningkatan SDM kader Muslimat NU melalui beragama workshop, pelatihan dan diskusi bekerjasama dengan berbagai pihak, terutama unsur pemerintah dan NGO. Program ini berorientasi pada pemberian pengetahuan, kertermpilan sekaligus sikap kader Muslimat NU Yang sadar pendidikan tanpa harus ada perbedaan antara laki dan perempuan, termasuk program Pemberangtasan Buta Huruf dan keaksaraan fungsional
- b. Peningkatan sumberdaya manusia calon-calon kader Muslimat NU dengan membangun, menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan baik formal maupun informal seperti Raudhatul Atfal (RA), TK, TPA dan TPQ, dengan terntuknya Ikatan Guru Raudhatul Atfal (IQRA)
- c. Bidang Kesehatan dan kesejahteraan melalui pantai-pantai asuhan yang dikelola Muslimat NU di level cabang dan anak cabang.

- d. Memperkuat kelompok-kelompok majelis ta'lim yang dikelola langsung oleh Lembaga Dhidmat Muslimat NU.
- e. Turut serta memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam hal perumusan kebijakan yang berpihak dan adil gender
- f. Membangun jejaring dengan kelompok-kelompok aktivis perempuan di NTB melalui Yayasan-yayasan yang menjadi perangkat langsung Muslimat NU.¹²

2. Potret Aisyiah NTB

Jarak kelahiran Aisyiah pusat dengan Aisyiah NTB cukup panjang, bahkan berdasarkan pemetaan Mufidah tentang gerakan perempuan Nusantra antara Aisyiah Pusat berada pada periode kedua, sementara Aisyiah di NTB ada pada period ke enam, yaitu periode Orde baru. PW Aisyiah NTB eksis secara kelembagaan pada tahun 1970, yang didahului eksistensinya oleh 3 Aisyiah Daerah kabupaten, masing-masing Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. Keberadaan Wilayah lebih belakang dibandingkan daerah, semata-mata aturan main kelembagaan Aisyiah, dimana pimpinan wilayah baru dapat dibentuk oleh pimpinan pusat, apabila di suatu wilayah setidaknya sudah terdapat 3 pengurus daerah.¹³

Perbedaan periode kelahiran tentu saja terjadi perbedaan tantangan dan strategi dakwahnya. Secara umum tantangan terbesar perempuan pada masa Orde baru adalah keterbelakangan perempuan dari sisi peran social, politik dan budaya. Oleh karena itu, di paruh ke dua rezimnya, Soeharto menjalankan konsep *Woment in Development* yang ditandai dengan ada Menteri khusus yang menangani urusan perempuan dalam kabinetnya. Dampaknya meluas ke pembentukan organisasi perempuan yang menjadi subordinat instansi pemerintah seperti Dharma Wanita, TP PKK, dan lain-lain. Perempuan memang mulai keluar dari rutinitas domestiknya, bisa berorganisasi sekalipun sebagai subordinat organisasi kaum bapak, atau sudah ada

¹² Wawancara dengan Hj. Sri Banun Muslim, Ketua Muslimat NU NTB tanggal 4 Desember 2014 dan Wawancara dengan Hj. Muna'ah Ahsyid, Ketua Khidmat NU tanggal 8 Desember 2014 beserta dokumen-dokumen Hasil Konferensi Wilayah Muslimat NU NTB semenjak tahun 1990-an – hingga 2000-an di Kantor PWNU NTB.

¹³ FGD dengan PW Aisyiah NTB, 5 Desember 2014 di Mataram

akses untuk tampil dalam pekerjaan public, namun urusan domestik sudah dikodratikan, sehingga berujung pada double burden (beban ganda) bagi perempuan.

Sekalipun jarak rentang antara pendirian Asyiah Nasional dengan Asyiah NTB, namun substansi isunya tak bergeser yakni seputar pengorganisasian perempuan untuk keluar dari TBC (takhayul, Bd'ah dan Churafat). Istilah TBC memang gencar sekali pada era 70-an sehingga tidak jarang antara organisasi modernis dan tradisional agak berjarak dengan isu ini. Namun, menurut PW Aisyiah NTB sampai dengan saat ini mandate utama Asiyiah adalah membrantas TBC dalam makna kontemporeranya seperti kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan, buruh migrant terutama TKW, dan sebagainya. Sesungguhnya tidak terjadi perbedaan isu antara Aisyiah pusat dan Aisyiah daerah NTB, terutama masalah-masalah yang menjadi koncern kehadiran Aisyiah, yakni seputar nasib perempuan yang termarginal dan dengan strategi yang masih sama, yakni pengembangan lembaga pendidikan dengan actor utamanya pada peserta didik perempuan.¹⁴

Komitemen Aisyiah NTB untuk menjadikan eksistensi kelembagaannya sebagai media dakwah Islamiyyah dengan meteri dari Allah untuk dan oleh perempuan – perempuan terdidik, maka dapat dilihat dari terbentuknya struktur Aisyiah di level kabupaten seluruh NTB dan Pengurus Aisyiah di Level Kecamatan. Hingga saat ini, Pimpinan daerah Aisyiah (PDA) se NTB terdiri dari 10 PDA; Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Utara. Pada level pimpinan Wilayah, juga terdiri dari beberapa majelis sebagai pelaksana program organisasi.¹⁵

Amal usaha, program dan kegiatan ini dijabarkan melalui struktur Asyiah dari tingkat Pusat hingga Ranting. Masing struktur memiliki pengurus dan perangkat kerja dalam bentuk Majelis dan Lembaga. Majelis yang menjadi perangkat kerja Aisyiah dengan tupoksinya masing – masing adalah sebagai berikut;

¹⁴ FGD dengan PW Asyiah NTB, tanggal 5 Desember 2014 di Mataram

¹⁵

- a. **Majelis Tabligh;** Berungsi untuk merealisasikan prinsip dan tujuan dakwah Aisyiyah yang bergerak dalam urusan kajian Islam kontekstual, dakwah dan pengamalan Islam. Mendesian dan mengembangkan gerakan-gerakan Dakwah Islam dalam seluruh aspek kehidupan, menguatkan kesadaran keagamaan masyarakat, mengembangkan materi, strategi dan media dakwah, serta meningkatkan kualitas mubalighat.
- b. **Majelis Kesejahteraan Sosial;** Pemahaman tentang kesejahteraan sosial yang diperjuangkan Aisyiyah adalah terciptanya suatu kondisi ideal dari tata kehidupan masyarakat yang *baladatum thayyibatun wa rabbun ghaffur*, yaitu suatu kehidupan bahagia sejahtera penuh limpahan rahmat dan nikmat Allah SWT. di dunia dan akhirat.
- c. **Majelis Kesehatan Dan Lingkungan Hidup;** Sebagai organisasi sosial, masalah kesehatan dan lingkungan hidup telah menempati posisi yang sangat serius dalam gerakan Aisyiyah. Dengan misi sebagai penggerak terwujudnya masyarakat dan lingkungan hidup yang sehat, Aisyiyah kemudian mengembangkan pusat kegiatan pelayanan dan peningkatan mutu kesehatan masyarakat serta pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan pelayanan.
- d. **Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah;** Sejalan dengan pengembangan pendidikan yang menjadi salah satu pilar utama gerakan Aisyiyah, majetis ini mengembangkan visi pendidikan Aisyiyah yang berakhlak mulia untuk umat dan bangsa. Dengan tujuan memajukan pendidikan (formal, non formal dan informal) serta mencerdaskan kehidupan bangsa hingga terwujud manusia muslim yang bertakwa, berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, cinta tanah air dan berguna bagi masyarakat serta diridhai Allah SWT, Majetis ini mengembangkan dan menangani masalah pendidikan dari usia pra TK sampai Sekolah Menengah Umum dan keguruan.
- e. **Majelis Ekonomi ;**Sebagai organisasi perempuan yang bergerak dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan, Aisyiyah diharapkan mampu menunjukkan komitmen dan kiprahnya untuk memajukan kehidupan masyarakat khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan

ketenagakerjaan. Majelis ekonomi bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi rakyat kecil dan menengah serta pengembangan-pengembangan ekonomi kerakyatan.

- f. **Majelis Pendidikan Kader;** Majelis ini menangani masalah kaderisasi dan pengembangan sumber daya kader di lingkungan Angkatan Muda Muhammadiyah Putri secara integratif dan professional yang mengarah pada penguatan dan pengembangan dakwah amar makruf nahi mungkar menuju masyarakat madani.
- g. **Majelis Pendidikan Tinggi :**Sejalan dengan perkembangan dunia pendidikan serta pendidikan Aisyiyah khususnya, majelis ini bertugas untuk membina, mengkoordinasikan Perguruan Tinggi Aisyiyah di seluruh Indonesia, serta memberikan bahan pertimbangan guna menentukan kebijakan yang berkaitan dengan bidang pendidikan tinggi Aisyiyah.¹⁶

Disamping beberapa majelis, Aisyiah juga memiliki beberapa bentuk lembaga sebagai perangkat kerja, antara lain; Lembaga Penelitian Dan Pengembangan, Lembaga Kebudayaan, Lembaga Hubungan Organisasi, Hukum Dan Advokasi (LHOHA), Lembaga Humas Dan Penerbitan. Namun dari sekian banyak majelis dan lembaga, Aisyiah NTB yang eksistensinya secara kelembagaan formal di NTB diawali tahun 1970-an, hanya Majelis Lembaga Pendidikan tinggi yang belum terwujud program dasarnya, yakni mengkoordinair perguruan tinggi yang dikelola organisasi Aisyiah, karena di NTB belum satupun perguruan tinggi yang langsung dikelola oleh Aisyiah NTB.¹⁷

¹⁶ Diakses dari website resmi PP Muhammadiyah, tanggal 12 Nopember 2014

¹⁷ FGD dengan PW Aisyiah NTB, tanggal 5 Desember 2014

PEMBAHASAN

1. Konteks Kelahiran Ulama Perempuan di NTB & Relevansinya Dengan Konteks Kekinian NTB

Muslimat NU dan Aisyiah sebagai representasi kelembagaan Ulama Perempuan di NTB memiliki karakter yang sama dari sisi rekrutmen, eksistensi dalam kelembagaan organisasi induknya, struktur organisasi dan permusyawaratan. Keduanya sama-sama organisasi sosial kemasyarakatan yang bersifat keagamaan. Kelahirannya juga tidak murni tindakan dan kehendak kaum perempuan, melainkan kolaborasi antar kehendak kaum perempuan dan dukungan laki-laki.

Aisyiah secara nasional merupakan wadah yang diprakarsai laki-laki pimpinan Muhammadiyah sebagai jawaban atas keertidasan kaum perempuan dari aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Sedangkan Muslimat NU, sekalipun dorongan kaum perempuan NU untuk membentuk Muslimat begitu keras, dari Kongres NU ke Kongres berikut, namun juga tak kunjung berhasil mempengaruhi sikap pengurus NU yang masih memandang perempuan sebagai makhluk kedua. Namun, disetiap generasi pasti ada kelompok yang berbeda cara pandangnya. Beberapa kiyai besar yang menjadi pimpinan NU, ikut berjuang mendorong Kongres NU mengakui keberadaan Perempuan NU sebagai anggota NU dan sekaligus mememberikannya kelembagaan otonom.

Sekalipun secara nasional, waktu kelahiran kedua organisasi perempuan ini cukup mencolok, namun di NTB hampir bersamaan eksistensinya sebagai kelompok organisasi sosial bersifat kemasyarakatan, yakni pada saat Orde baru menjalankan politik institusionalisasi peranan wanita melalui ada kementerian khusus dan selanjutnya dibentuk beberapa organisasi khusus pula hingga ke level pemerintahan paling bawah. Sekalipun, kelahiran Aisyiah dan Muslimat NU di NTB pada era orde baru dengan teori Women in Development (wanita dalam pembangunan), namun sesungguhnya kondisi perempuan di NTB masih sangat memperhatikan dari aspek sosial, budaya, agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Tingkat pendidikan, kesehatan,

kesejahteraan social perempuan NTB masih sangat memperhatikan. Bahkan hingga kini, tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadi barometer dalam menilai kualitas pembangunan di beberapa Daerah, NTB masih dalam posisi urutan ke dua dari bawah, keseluruhan provinsi NTB.

2. Respon dan Peran Sosial Ulama Perempuan di NTB

Banyak kalangan terutama aktivis perempuan justru menyepelkan keberadaan organisasi-organisasi perempuan seperti Aisyiah dan Muslimat NU sebagai agen perubahan bagi nasib kaum perempuan. Mereka memandang, keberadaan organisasi Aisyiah dan Muslimat NU, disatu sisi, merupakan organisasi bawahan dari NU dan Muhammadiyah, dan pada sisi yang lain, kedua organisasi ini terlalu birokratis dan procedural. NU dan Muhammadiyah, oleh beberapa aktivis Perempuan justru dinilai sebagai institusi social keagamaan yang turutserta melestarikan berbagai kondisi social yang mendukung terwujudnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.¹⁸

Kritik eksternal terhadap keberadaan kedua lembaga ulama perempuan ini, Aisyiah dan Muslimat NU, kalau dilihat dari konteksnya mungkin juga ada benarnya, dimana Aisyiah dan Muslimat NU memang terlihat tidak progressif dalam menanggapi Bergam isu-isu ketidaksetaraan dan keadilan gender kekinian seperti kondisi perempuan yang diperlakukan tidak adil dalam rumah tangganya, kasus TKI perempuan yang diperkosa majikannya di daerah kerjanya di Luarn negeri, dan sebagainya. Namun, disisi lain, sesungguhnya dengan gemuknya struktur organisasi ini, maka cara kerjanya uga sistematis dan stagnan. Mislanya, Muslimat NU dan Aisyiah NU melakukan pendidikan kritis, pengorganisasian warga melalui strukturnya yang sudah rapi serta perangkat kelembagaannya yang lainnya. Agenda mereka hampir bersifat establish melalui lembaga pendidikan formal dan informal, baik sekolah, majelis taklim dan sebagainya. Strategi yang mereka lakukan, memang tidak cenderung menyerang, apalagi main publikasi, melainkan cenderung melihat akar masalahnya, yakni pendidikan.

¹⁸ Diskusi-dikusi kecil Peneliti dengan aktivis perempuan di secretariat JMS Lobar, tanggal 15 Nopember 2014

Bagi Aisyiah dan Muslimat NU, ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di NTB saat ini, minimal sudah dapat berkurang akibat kerja keras Aisyiah dan Muslimat NU dengan kelompok lainnya, misalnya dengan hampir setaranya antara Angka Partisipasi Pendidikan antara laki dan perempuan di level SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK, bahkan ke tingkat perguruan tinggi.¹⁹ Konsistensi dan kesinambungan gerakan Aisyiah dan Muslimat NU dalam mendongkrak harkat dan martabat perempuan di NTB adalah hal yang lebih dari ke dua organisasi ini dibandingkan dengan organisasi perempuan yang masuk kategori LSM dan NGO yang cenderung programatik, kasuistis dan sangat bergantung pada donor. Bahkan pola kelembagaan kelompok perempuan LSM/NGO pun terus berubah sesuai “kebutuhan internal” kelompok LSM dan NGO itu sendiri atau “tuntutan eksternal” dari kelompok donor.

Aisyiah dan Muslimat NU NTB sebagai dua organisasi perempuan tetap mempertahankan struktur kelembagaannya, bentuknya sebagai organisasi social kemasyarakatan (ormas) yang bersifat keagamaan dengan posisinya yang tetap sebagai bagian dari organisasi induknya –yang notabene—organisasi laki-laki, namun dalam hal menjawab tantangan eksternal, seperti tuntutan kebijakan pemerintah maupun Donor yang mensyaratkan kerjasamanya dengan lembaga yang berbadan hukum, maka Muslimat NU justru melakukan modifikasi kelembagaannya dengan menambah perangkat kerja kelembagaan berupa perangkat yang berbadan hukum berupa Yayasan.

Diakui oleh kedua lembaga perempuan ini, bahwa tantangan besar juga dalam mewujudkan tatanan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender adalah isu-isu yang berkaitan dengan paham keagamaan seperti tafsir poligami yang masih seenaknya laki-laki, tafsir tentang laki-laki sebagai pemimpin baik dalam rumah tangga maupun bidang public dan seterusnya. Mereka juga mengakui bahwa berkembangnya pemahaman demikian tidak lepas dari peran tokoh-tokoh agama yang bias gender, dan biasanya laki-laki. Namun demikian, bukan berarti Aisyiah dan Muslimat NU mengamini tafsir

¹⁹ Wawancara dengan Hj. Sribanun Muslim, Ketua Musliat NU, tanggal 5 Desember 2014 dan FGD dengan PW Aisyiah NTB tanggal 5 Desember 2014

yang demikian, hanya saja cara dan strategi menentanginya dengan cara *hal*, bukan dengan *lisan*. Disinilah perbedaan mendasar antara Ormas perempuan dan LSM perempuan dalam menanggapi wacana dan isu bias gender. Ormas keagamaan, Aisyiah dan Muslimat NU cenderung melalui tindakan nyata berupa penyelenggaraan program yang konstinu seperti lembaga pendidikan formal, informal bahkan melalui usaha-usaha social lainnya seperti pantai asuhan, majelis ta'lim dan sebagainya, sedangkan perempuan LSM cenderung dengan cara yang aga progressif berupa advokasi; publsing media dan aksi demonstrasi.²⁰

3. Tatakelola Kelembagaan Ulama Perempuan dan Relasinya dengan Organisasi Induknya dan Organisasi Lainnya

Muhammadiyah dan atau Nahdlatul Ulama yang lahir atas inisiatif kaum laki-laki adalah hal yang wajar, sebab mereka, kaum laki-laki, sesungguhnya telah lam mendapatkan kenikmatan berupa peluang untuk mengenyam pendidikan. Mendirikan organisasi, bagi laki-laki, tentu tidaklah menjadi tantangan mendasar, tetapi mendirikan organisasi perempuan oleh perempuan untuk perempuan, di saat perempuan sedikipun diberikan celah akses untuk mengenyam pendidikan.

Dengan kondisi demikian, maka tidak menjadi masalah kalau Aisyiah sebagai organisasi perempuan yang modern saat ini justru diprakarsai dan dinisiaisi secara penuh oleh laki-laki, yaitu para pendiri Muhammadiyah. Namun, fasilitasi pendirian Aisyiah oleh pimpinan Muhammadiyah yang notabena laki-laki, bukan bermaksud mensobordinasi perempuan, melainkan tulus untuk memberdayakan perempuan. Hal ini terbukti dengan agenda pendahuluannya, yakni pendirian lembaga pendidikan yang pesertanya adalah perempuan-perempuan belia yang sama sekali tak memiliki akses terhadap pendidikan oleh factor budaya, agama dan ekonomi. Kelompok pengajian ini disebut *sapa trasna*. Ketiak peserta pengajian sapa tresna dianggap memadai

²⁰ Obeservasi peneliti dari berbagai kegiatan Ormas perempuan dan Organisasi LSM perempuan di NTB.

kapasitasnya dari sisi keilmuan, keterampilan dan kepemimpinan, maka diajaklah beremubuk untuk membentuk organisasi perempuan yang diberinama Aisyiah. Aisyiah dengan demikian resmi diprakarsai dan didirikan oleh Pimpinan Muhammadiyah, namun kemampuan perempuan – perempuan tersebut dapat menjadikan asiyah menjadi organisasi perempuan modern yang berkembang dengan pesat. Atas kondisi demikian, Aisyiah -- hingga saat ini—disatu sisi tetap menjadi bagian Muhammadiyah, yang segala aktivitas dan agenda strategis Aisyiah tidak boleh bertentangan dengan keputusan forum persmusyawaratan tertinggi Muhammadiyah, namun pada sisi lain Aisyiah juga tetap berusaha agar dalam pengambilan keputusan dalam forum permusyawaratan Muhammadiyah, Aisyiah ada di dalamnya dan menjadi bagian dari pihak yang mengabil keputusan tersebut. Atas tuntutan demikian, maka Muhamamdiyahpun mengakomodirnya dengan menetapkan Aisyiah sebagai organisasi otonom khusus (ORTOMSUS), dimana setiap pimpinan Aisyiah secara otomaticalla (ex-officio) menjadi pimpinan Muhamamdiyah sesuai jenjang dan level kepemimpinannya.

Hal sama, namun sedikit berbeda adalah Muslimat NU, dimana kehadirannya merupakan penuh perjuangan kaum perempuan NU, yang didik berserikat secara tidak sadar oleh pengurus NU. Sebab, dari semenjak berdirinya NU tahun 1926 sampai 1940-an sama skali tetap berpendirian, bahwa perempuan tidak layak mendapatkan pendidikan apalagi berorganisasi. Namun, karena posisinya sebagai istri atau nyai, yang selalu ikut dalam pertemuan-pertemuan pengurus NU, yang notabe, suaminya. Proses-proses perkumpulan tak disengaja inilah mulai muncul kesadaran akan pentingnya keterlibatan perempuan dalam bergam aktivistas social, politik dan budaya. Semakin, sering perempuan ini ikut bertemu, maka semakin kuat pula isu dan wacananya untuk meminta menjadi bagian penting dalam NU, sehingga atas fasilitasi laki-laki yang juga menjadi kiyai berpengaruh dalam NU, melalui Mukhtar NU di Menes – perempuan diakui sebagai anggota NU yang disebut Nahdlatl Oelama Muslimat (NOM), namun pada Mukhtar tahun 1946 di Surabaya, maka naik statusnya dari sekadar diakui sebagai anggota

menjadi kebihannya menjadi pengurus NOM, dan pada tahun 1952, NU memutuskan bahwa NOM adalah badan otonom NU yang diberinama baru menjadi Muslimat NU. Kehadiran Muslimat NU baik sebagai organisasi perempuan yang berskala nasional dan modern di Indoensia maupun sebagai organisasi badan otonom NU, tak lepas dari uluran tangan kaum laki-laki yang memang memiliki kepedulian terhadap nasib perempuan.

Dengan demikian, Muslimat NU maupun Asyiah adalah organisasi perempuan modern yang bersifat keagamaan dan berskala nasional di Inoonesia, yang semenjak berdirinya beriringan dengan kemerdekaan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia hingga kini masih tetap eksis bahkan semakin menemukan bentuknya yang lebih simple dan lincah. Padahal kalau mengacu pada teori organisasi Nirlaba yang secara alamiah akan mengalami pase-pase yang disamakan denganpase kelahiran manusia; mulau pase bayi dalam kandungan atau organisasi dalam cita-cita, pase melahirkan, pase membentuknya, pase mungil dan menyenangkan, pase awal yang serba semangat, lincah dan energik, pase dewasa yang cenderung stabil, pase birokratis dengan pola kerja yang kelas, mapan dan akhkirnya semua bersikap menjadi manager, dan terakhir pase berumah tangga atau mengahiri masa lajangnya, pase kolaborasi, regenerasi dan konflik.²¹

Berdasarkan teori ini, Aisyiah dan Muslimat NU adalah organisasi nirlaba, tidak mencari profit atau keuntungan material, namun di lihat dari sisi usianya sudah masuk melampaui usia manusia, dan kondisi organisasinya masih sehat, dinamis dan energik. Hal ini disebabkan oleh periodesasi kepengurusan, kaderisasi yang terus berjalan serta program yang terus berkembang. Bahkan, teori Organisasi nirlaba di atas cukup efektif untuk memotret kondisi organisasi perempuan berbentuk LSM, yang hampir rata-rata tidak ada yang mampu bertahan melampaui separo dari usia kedua organisasi perempuan seperti Aisyiah dan Muslimat NU.

Ke-eksis-an kedua lembaga ini sesungguhnya terletak pada posisinya yang hebat, disatu sisi ada organisasi induk yang menaungi, minimal sebagai

²¹ Tim Penulis, *Panduan Organisasi Nirlaba*, Jakarta, P3M, 1990, hal. 15

lembaga advice, yaitu Muhammadiyah bagi Aisyiah dan Nadhlatul Ulama bagi Muslimat NU, namun pada sisi lain sesungguhnya Aisyiah adalah OTUMSUS di Muhammadiyah dan Muslimat NU adalah Badan Otonom, yang dalam AD/ART NU tidak disepesifikkan dengan organisasi otonom lainnya, melainkan dari sisi kewenangannya hampir setara dengan NU, dimana Muslimat NU memiliki lembaga pendidikan sendiri, memiliki Yayasan sendiri bahkan memiliki lembaga-lembaga yang jumlahnya banyak sekali. Otonomi Muslimat dalam di dalam tubuh NU hanya sebatas ikatan ideologis dan pemaknaan symbol “NU” dibelakang nama Muslimat.

Keberadaan Aisyiah dan Muslimat NU dalam struktur organisasi Induknya sebenarnya sama, dimana Aisyiah disebut sebagai organisasi Khusus akibat dari status ketua Aisyiah yang *ex-officio* Pimpinan Muhammadiyah sesuai jenjang dan level pimpinannya, maka dalam AD/ART NU juga disebutkan, bahwa masing-masing Ketua Badan Otonom NU beserta ketua Lembaga dan Lanjahan di lingkungan NU adalah Anggota Pleno dari pengurus NU sesuai level dan jenjang strukturnya. Hanya saja, perjuangan organisasi perempuan NU terasuk kader-kader NU yang feminis belum berhasil memperjuangkan perempuan NU untuk masuk menjadi dalam struktur syuriah pada semua level dan jenjang pimpinan. Syuriah adalah symbol kelembagaan ulama dalam tubuh NU.

Ketika perempuan tidak dapat masuk menjadi bagian dalam struktur syuriah, maka NU belum mengakui keberadaan perempuan sebagai ulama. Justru kader-kader perempuan NU yang justru bergerak mewujudkan ulama perempuan melalui beragam kelembagaan perempuan LSM dan publikasi. Rahima adalah salah satu contoh LSM perempuan yang pegiatnya adalah kader-kader perempuan NU, dan saat ini konsern dengan program penguatan Ulama Perempuan. Anehnya, tidak sedikit kiyai-kiyai kahrismatik NU justru sangat getol menjadi bagian dari program penguatan ulama perempuan yang diprogramkan oleh Rahima seperti KH. Husain, KH. Faqhuddin Abdul Qadir, dan sebagainya.

KESIMPULAN

Dari beragam paparan data diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai rumusan msalah penelitian ini, yaitu antara lain;

1. Kelahiran Aisyiah NTB dan Muslimat NU di NTB sangat bergantung pada kebijakan pimpinan pusat masing-masing, dengan memenuhi prosedur-prosedur tetap, yaitu minimal telah terbentuk Muslimat NU atau Aisyiah di 3 Cabang dalam satu Provinsi. Terpenuhinya persyaratan minimal dalam pembentukan Aisyiah dan Muslimat NU di NTB tidak lepas dari usaha kolektif antara kader-kader perempuan Muhammadiyah dan NU didukung dan difasilitasi oleh Pimpinan Muhammadiyah dan NU NTB. Kondisi demikian tidak jauh berbeda dengan kondisi historis pembentukan Muslimat NU dan Aisyiah di Pusat. Bahwa dengan demikian, maka percepatan advokasi dan pemberdayaan perempuan tidak bisa lepas antara sinergi aktivis perempuan dengan aktivis laki-laki yang memiliki kesepahaman yang sama dalam hal mewujudkan tatanan social yang berkesetaraan dan berkeadilan gender. Saling meninggalkan apalagi saling *vis a vis* antara keduanya justru akan menjadi boomerang panjang dalam menggapai tujuan final. Kebersediaan dan keberterimaan perempuan-perempuan di NTB termasuk kaum laki-laki terhadap eksistensi Aisyiah dan Muslimat NU hingga level grassroot melalui beragam program, termasuk program dakwah, muballig dan majelis ta'lim, justru menjadi bukti bahwa Aisyiah dan Muslimat NU NTB adalah representasi kelembagaan Ulama perempuan di NTB
2. Keberadaan Aisyiah dan Muslimat NU dalam struktur organisasi Induknya sebenarnya sama, dimana Aisyiah disebut sebagai organisasi Khusus akibat dari status ketua Aisyiah yang *ex-officio* Pimpinan Muhammadiyah sesuai jenjang dan level pimpinannya, maka dalam AD/ART NU juga disebutkan, bahwa masing-masing Ketua Badan Otonom NU beserta ketua Lembaga dan Lajnah di lingkungan NU adalah Anggota Pleno dari pengurus NU sesuai level dan jenjang strukturnya. Hanya saja, perjuangan organisasi perempuan NU termasuk kader-kader NU yang feminis belum berhasil memperjuangkan perempuan NU untuk masuk menjadi dalam struktur syariah pada semua

level dan jenajng pimpinan. Syuriah adalah symbol kelembagaan ulama dalam tubuh NU.

3. Bagi Aisyiah dan Muslimat NU, ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di NTB saat ini, minimal sudah dapat berkurang akibat kerja keras Aisyiah dan Muslimat NU dengan kelompok lainnnya, misalnya dengan hampir setaranya antara Angka Partisipasi Pendidikan atara laki dan perempuan di level SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK, bahkan ke tingkat perguruan tinggi. Konsistensi dan kesinambungan gerakan Aisyiah dan Muslimat NU dalam mendongkrak harkat dan martabat perempuan di NTB adalah hal yang lebih dari ke dua organisasi ini dibandingkan dengan organisasi perempuan yang masuk kategori LSM dan NGO yang cenderung programtik, kasuistis dan sangat bergantung pada donor. Bahkan pola kelembagaan kelompok perempuan LSM/NGO pun terus berubah sesuai “kebutuhan internal” kelompok LSM dan NGO itu sendiri atau “tuntutan eksternal” dari kelompok donor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, *Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Multidisipliner*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006
- Atho, M. Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Amal, Siti Hidayati, *Beberapa Perspektif Feminis dalam Menganalisis Permasalahan Wanita*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1995
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU hasil Mukhtamar Ke 32 di Makassar
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Muhammadiyah
- Azis DY, Aceng Abdul, 2003, *Kiprah Nabdlatul Ulama dalam Bidang Pendidikan*, dalam LP. Ma'arif NU Pusat, *NU: Dari Ulama untuk Indonesia* (Jakarta, 20 Desember)
- Alfons Van der Kraan, *Lombok, Penaklukan, Penjajahan dan Keterbelakangan*, (terj) M. Donny Supanra, Mataram Lengge, 2009
- Anak Agung Ketut Agung, *Kupu-Kupu Kuning Yang Terbang Di selat Lombok, Lintasan Sejarah Kerajaan Karangasem (1661-1950)*, Denpasar, Upada Sastra, 1991
- Budiman, Arief, *Pembagian Kerja secara Seksual, Sebuah Pendekatan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*, Jakarta: Gramedia. 1981,
- Burhanudin, jajat (ed), *Ulama Perempuan Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2002,

- Bayu Windia, *Manusia Sasak Bagaimana Menggaulinnya?*, Yogyakarta: Genta Press, 2006
- Bruinessen, Martin van, 1994, *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, terj. Farid Wajidi (Yogyakarta: LKiS)
- Djuwita, Warni, Potret Ulama Perempuan Sasak, ULUMUNA, Edisi 13 tahun 2003.
- Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Diindonesiakan oleh Robert M.Z. Lawang, Jakarta, Gramedia, cet. III, 1994
- Erni Budiwanti, Islam Sasak; Wetu Telu Versus Waktu Lima, terj. Noorcholis dan Hairus Salim (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 1.
- Fath. Zakaria, *Mozaike Budaya Orang Mataram*, (Mataram: Yayasan Sumurmas Al-Hamidy, 1998)
- Farid Masdar Mas'udi, Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, Bandung: Mizan, 1996.
- Fathurrahman Zakaria, *Mozaike Budaya Orang Mataram*; Mataram: Yayasan Sumurmas Al-Hamidy, 1998
- Mansour Fakih, dkk, Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 1994
- Gde Suparman, *Babad Praya*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994
- , *Babad Sakera*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994
- , *Dulang 1 Perkawinan*, (Mataram: Lembaga Pembakuan dan Penyebaran Adat Sasak, 1995)
- , *Titi Tata Adat Perkawinan Sasak, Kepembayunan Lan Candrasengkala* (Mataram: Lembaga Pembakuan dan Penyebaran Adat Sasak Mataram Lombok, 1988).
- Andree Feillard; NU, Vis-à-vis Negara. Pencarian Visi, Bentuk dan Makna, (Yogyakarta, LKiS).
- Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Muslimat NU Tahun 2010-2015
- Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Aisyiyah
- Moleong, J, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung; Rosdakarya, 2002)
- Keputusan-keputusan Konfresi Wilayah Muslimat NU NTB
- Keputusan-keputusan Konfresi Wilayah Aisyiyah NTB
- Taqiuddin, Ahmad, Sejarah NU Lombok,